

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANDUNG TENTANG LARANGAN SAMPAH
PLASTIK ATAU PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOAAN SAMPAH SERTA UNDANG-UNDANG
NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh

Nurika Ummiyati

41151010160168

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi ilmu hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***BANDUNG'S GOVERNMENT POLICY CONCERNING
THE PROHIBITION OF PLASTIC WASTE OR THE
USED OF PLASTIC BAG(S) CORRELATING WITH
INDONESIA LAW NO. 18 OF 2008 TITLED WASTE
MANAGEMENT AND INDONESIA LAW NO. 32 OF
2009 TITLED ENVIRONMENTAL PROTECTION AND
MANAGEMENT***

By

Nurika Ummyati

41151010160168

Final Project

*To Fulfill One Of The Exam Requirements In Order To Obtain A Law Degree
In A Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurika Ummiyat

NPM : 41151010160168

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG LARANGAN SAMPAH PLASTIK ATAU PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOAAN SAMPAH SERTA UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat, dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang Memberi Pernyataan

Nurika Ummiyati
41151010160168

Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

Pembimbing

Dani Durahman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, tanpa di sadari pembangunan merupakan penyebab dari perubahan lingkungan hidup yang berskala besar, berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada pada saat ini merupakan pencipta limbah yang dapat mencemarkan lingkungan, adapun masalah lingkungan secara mendasar didefinisikan sebagai “perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negative terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia” dengan demikian dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, pemerintahan maupun Negara Indonesia. Masalah lingkungan akhir-akhir ini merupakan salah satu masalah yang menduduki tempat perhatian yang tidak ada habis-habisnya, ada dua hal yang paling berkaitan didalam masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup karena saat ini kerusakan lingkungan hidup sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan menjadi masalah yang meng-global paada era sekarang.

Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa tahap penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, yang terdiri dari Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa literatur kepustakaan atau buku-buku, karya ilmiah, tulisan dan pendapat para ahli, serta Bahan hukum tersier, yaitu berupa semua data-data yang memberikan tambahan ilmu dan informasi berupa Kamus Bahasa Indonesia dan jurnal-jurnal di internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan culture/budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

ABSTRACT

Indonesia is a country that is actively carrying out development, without realizing that development is the cause of large-scale environmental changes, various kinds of industrial and technological activities currently exist that create waste that can pollute the environment, while environmental problems are fundamentally defined. as "changes in the environment, either directly or indirectly, which may cause negative consequences on human health and welfare" thus causing harm to society, the government and the State of Indonesia. Environmental problems lately are one of the problems that occupy the place of endless attention, there are two things that are most related in the problem of environmental management, namely the emergence of environmental pollution and destruction because currently environmental damage has become a very serious problem. unsettling for humans and a global problem in the present era.

In the preparation of this thesis, the author uses several stages of research to obtain the necessary data, which consists of primary legal materials, namely in the form of statutory regulations, namely Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Law Number 32 of 2009 concerning Protection And Environmental Management. Furthermore, secondary legal materials, namely materials that provide an explanation of primary legal materials, in the form of literature or books, scientific works, writings and opinions of experts, as well as tertiary legal materials, namely in the form of all data that provide additional knowledge and information in the form of Indonesian Dictionary and journals on the internet.

The results showed that environmental law enforcement in the field of waste management refers to 3 legal systems which are a combination of components, namely structure, substance and culture / culture. In addition, with regard to law enforcement in waste management, it can be studied from 2 sides, namely preventive and repressive law enforcement. Law enforcement in waste management is also a manifestation of the government and local governments in implementing the principles of Good Environmental Governance with the aim of raising awareness for the community about the importance of waste management.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah atas ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana di Jurusan Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Langlangbuana Bandung. Berikut judul skripsi yang penulis ajukan yaitu : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG LARANGAN SAMPAH PLASTIK ATAU PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOAAN SAMPAH SERTA UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu karena tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dani Durahman, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan saran dan masukan selama penulisan skripsi hingga selesai. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih banyak untuk beberapa pihak yang mendukung dan berkontribusi besar, kepada yang terhormat:

1. Bapak DR.H.R AR. Harry Anwari, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.h., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, beserta jajarannya.
9. Terimakasih kepada seluruh jajaran Dosen Universitas Langlangbuana.
10. Terimakasih Kepada Ciavi A.G Katim, Gilang Nur Alif P, Nugie Alfhama C, Andiny Dhika Utami, Silmi Yusniar Sughandi, Suci Nurcahyani, Wisnu Nugraha, Gilang Puji A., dan seluruh anggota kelas A3 angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana selaku sahabat-sahabat seperjuangan saya selama masa perkuliahan.
11. Terimakasih kepada Ghea Dwi Annisa dan Sinta Wulan Sari Selalu menjadi pendengar yang baik, dan selalu memberikan semangat motivasi kepada penulisan skripsi.

Ucapan terima kasih khusus dari penulis ucapkan kepada orangtua dan keluarga penulis : Bapak Suparno Purnomo (Alm), Ibu Siti Aminah dan Ibu Oneng

tidak lupa kepada kakak-kakak penulis yaitu Sutrisno, Suyanto, Kokom Susanti, Joko Susilo, Nita Haryani dan Isna Musthatiah. Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain Terimakasih banyak dan Alhamdulillah.

Penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap kepada seluruh pihak agar dapat memberikan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik namun penulis tetap berharap skripsi ini dapat berguna untuk seluruh pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, 20 Oktober 2020

Nurika Ummyati

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

ABSTRAKi

ABSTRACTii

KATA PENGANTARiii

DAFTAR ISI.....vi

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Identifikasi Masalah6
- C. Tujuan Penelitian6
- D. Kegunaan Penelitian.....7
- E. Kerangka Pemikiran.....7
- F. Metode Penelitian.....14

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGELOLAAN PLASTIK

SAMPAH

- A. Tinjauan Umum mengenai kebijakan larangan sampah17
 - 1. Pengertian Kebijakan17
 - 2. Pengertian kebijakan pengelolaan sampah21
- B. Tinjauan Umum mengenai pemerintahan daerah dan peraturan daerah22
 - 1. Pengertian Pemerintah Daerah22
 - 2. Pengertian peraturan daerah24
 - 3. Mekanisme pembuatan atau pembentukan peraturan daerah.....25
- C. Tinjauan Umum mengenai Hierarki Perundang-Undangan.....29
 - 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.....29
 - 2. Pengesahan dan penetapan perundnag-undangan31
 - 3. Hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan33
- D. Tinjauan Umum mengenai sampah, sampah plastik, pengelolaan sampah34

1. Pengertian sampah	34
2. Pengelolaan Sampah	36
3. Pengertian sampah plastik	39
4. Jenis Plastik	39
5. Bahaya penggunaan plastik dan sampah plastik	42
6. Pengelolaan sampah	44
7. Pelaksanaan pengelolaan sampah	49

BAB III. ATURAN PERATURAN DAERAH MENGENAI LARANGAN SAMPAH PLASTIK BERTUMPANG TINDIH DENGAN ATURAN YANG LEBIH TINGGI

A. Gambaran Umum Kebijakan Larangan Sampah Plastik Atau Penggunaan Plastik Di Kota Bandung	50
B. Gambaran Umum Aturan Pengelolaan Sampah Di Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.....	52
C. Gambaran Aturan Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	55
D. Kasus	57

BAB IV. ATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN SAMPAH PLASTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Aturan Larangan Sampah Plastik Jika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup	60
B. Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Sampah Plastic	65

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP